

LAMPIRAN

Lampiran 1 CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : *Informan* menanggapi pewawancara

I-I : Pewawancara menanggapi *Informan*

2. Coding Key Informan I

Wawancara Key Informan 1

Kode : I

Jabatan : Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak.	14	I/I/1/14
I	• Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak	24	I/I/1/24
I	• Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak	34	I/I/1/34
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan	42	I/I/1/42
I	• Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan.	49	I/I/1/49
I	• Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang	53	I/I/1/53

	melakukan pembayaran pajak tepat waktu.		
I	• Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP.	71	I/I/1/71
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya	75	I/I/1/75
I	• Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	84	I/I/1/84

Lampiran 1 TRANSKRIP WAWANCARA “I”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

I: Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak (**I Baris 14**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

I: Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya (**I Baris 24**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

I: Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak (**I Baris 34**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

I: Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong (**I Baris 42**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

I: Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan (**I Baris 49**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

I: Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 53**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

I: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 71**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

I: Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran Masyarakat (**I Baris 75**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

I: Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan

serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (**I Baris 84**)

Wawancara *Key Informan 2*

Kode : A

Jabatan : Pegawai Kantor Samsat Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak.	3	A/I/2/3
I	• Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	12	A/I/2/12
I	• Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak.	18	A/I/2/18
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan	24	A/I/2/24
I	• Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan.	31	A/I/2/31
I	• Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	35	A/I/2/35
I	• Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP.	39	A/I/2/39

I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya.	42	A/I/2/42
I	• Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	51	A/I/2/51

Lampiran 2 TRANSKRIP WAWANCARA “A”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

A: Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak. (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

A: Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 12**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

A: Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. (**I Baris 18**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

A: Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 24**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

A: Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan. (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

A: Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 35**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

A: Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 39**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

A: Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya (**I Baris 42**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

A: Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (**I Baris 51**)

Wawancara Key Informan 3

Kode : J

Jabatan : Pegawai Kantor Samsat Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak.	4	J/I/3/4
I	• Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak	14	J/I/3/14
I	• Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak	24	J/I/3/24
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan	32	J/I/3/32
I	• Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan.	39	J/I/3/39
I	• Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	43	J/I/3/43
I	• Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP.	47	J/I/3/47

I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya	51	J/I/3/51
I	• Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	60	J/I/3/60

Lampiran 3 TRANSKRIP WAWANCARA “J”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

J: Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak (**I Baris 4**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

J: Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya (**I Baris 14**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

J: Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak (**I Baris 24**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

J: Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong (**I Baris 32**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

J: Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan (**I Baris 39**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

J: Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 43**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

J: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 47**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

J: Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran Masyarakat (**I Baris 51**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

J: Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan

serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (**I Baris 60**)

Wawancara Key Informan 4

Kode : MR

Jabatan : Pegawai Kantor Samsat Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak.	3	MR/I/4/3
I	• Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	12	MR /I/4/12
I	• Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak.	18	MR /I/4/18
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan	24	MR /I/4/24
I	• Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan.	31	MR /I/4/31
I	• Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	35	MR /I/4/35
I	• Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP.	39	MR /I/4/39

I	Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya.	42	MR /I/4/42
I	Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	51	MR /I/4/51

Lampiran 4 TRANSKRIP WAWANCARA “MR”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

MR: Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak. (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

MR: Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 12**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

MR: Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. (**I Baris 18**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

MR: Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 24**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

MR: Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan. (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

MR: Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 35**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

MR: Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 39**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

MR: Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya (**I Baris 42**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

MR: Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (**I Baris 51**)

Wawancara *Key Informan* 5

Kode : H

Jabatan : Pegawai Kantor Samsat Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak.	3	H/I/5/3
I	• Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	12	H/I/5/12
I	• Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak.	18	H/I/5/18
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan	24	H/I/5/24
I	• Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan.	31	H/I/5/31
I	• Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	35	H/I/5/35
I	• Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP.	39	H/I/5/39
I	• Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK	42	H/I/5/42

	dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya.		
I	• Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	51	H/I/5/51

Lampiran 5 TRANSKRIP WAWANCARA “H”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

H: Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak. (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

H: Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 12**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

H: Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. (**I Baris 18**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

H: Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 24**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

H: Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan. (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

H: Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 35**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

H: Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 39**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

H: Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya (**I Baris 42**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

H: Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (**I Baris 51**)

Wawancara Key Informan 6

Kode : NR

Jabatan : Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai.	3	NR/I/6/3
I	Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.	11	NR/I/6/11
I	Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi.	19	NR/I/6/19
I	Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan.	25	NR/I/6/25
I	Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan.	32	NR/I/6/32
I	Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	37	NR/I/6/37

I	• Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan.	40	NR/I/6/40
I	• Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK.	43	NR/I/6/43
I	• Yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	48	NR/I/6/48

Lampiran 6 TRANSKRIP WAWANCARA “NR”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

NR: Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

NR: Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan (**I Baris 11**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

NR: Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi (**I Baris 19**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

NR: Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

NR: Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan
(**I Baris 32**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

NR: Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 37**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

NR: Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan (**I Baris 40**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

NR: Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK (**I Baris 43**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

NR: Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak (**I Baris 48**)

Kode : NH

Jabatan : Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kamiendarai.	3	NH/I/7/3
I	• Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.	11	NH/I/7/11
I	• Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi.	19	NH/I/7/19
I	• Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan.	25	NH/I/7/25
I	• Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan.	32	NH/I/7/32
I	• Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	37	NH/I/7/37

I	• Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan.	40	NH/I/7/40
I	• Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK.	43	NH/I/7/43
I	• Yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	48	NH/I/7/48

Lampiran 7 TRANSKRIP WAWANCARA “NH”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

NH: Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

NH: Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan (**I Baris 11**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

NH: Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi (**I Baris 19**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

NH: Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

NH: Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan
(**I Baris 32**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

NH: Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 37**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

NH: Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan (**I Baris 40**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

NH: Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK (**I Baris 43**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

NH: Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak (**I Baris 48**)

Kode : M

Jabatan : Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai.	3	M/I/8/3
I	• Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.	11	M/I/8/11
I	• Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi.	19	M/I/8/19
I	• Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan.	25	M/I/8/25
I	• Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan.	32	M/I/8/32
I	• Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	37	M/I/8/37

I	• Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan.	40	M/I/8/40
I	• Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK.	43	M/I/8/43
I	• Yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	48	M/I/8/48

Lampiran 8 TRANSKRIP WAWANCARA “M”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

M: Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

M: Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan (**I Baris 11**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

M: Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi (**I Baris 19**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

M: Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

M: Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan (**I Baris 32**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

M: Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 37**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

M: Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan (**I Baris 40**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

M: Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK (**I Baris 43**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

M: Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak (**I Baris 48**)

Kode : R

Jabatan : Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai.	3	R/I/9/3
I	• Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.	11	R/I/9/11
I	• Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi.	19	R/I/9/19
I	• Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan.	25	R/I/9/25
I	• Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan.	32	R/I/9/32
I	• Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	37	R/I/9/37

I	• Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan.	40	R/I/9/40
I	• Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK.	43	R/I/9/43
I	• Yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan	48	R/I/9/48

Lampiran 9 TRANSKRIP WAWANCARA “R”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

R: Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai (**I Baris 3**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidak patuhan pajak?

R: Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan (**I Baris 11**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

R: Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi (**I Baris 19**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

R: Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

R: Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan (**I Baris 32**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

R: Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 37**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

R: Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan (**I Baris 40**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

R: Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK (**I Baris 43**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

R: Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak (**I Baris 48**)

Kode : S

Jabatan : Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami.	4	S/I/10/4
I	• Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	16	S/I/10/16
I	• Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami.	20	S/I/10/20
I	• Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan	25	S/I/10/25
I	• Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan	31	S/I/10/31
I	• Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi.	34	S/I/10/34

I	• Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan.	38	S/I/10/38
I	• Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya.	41	S/I/10/41
I	• Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu.	46	S/I/10/46

Lampiran 10 TRANSKRIP WAWANCARA “S”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

S: Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kami pun akan takut. Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami (**I Baris 4**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

S: Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 16**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

S: Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami (**I Baris 20**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

S: Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

S: Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

S: Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi (**I Baris 34**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

S: Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan (**I Baris 38**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

S: Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya (**I Baris 41**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

S: Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu (**I Baris 46**)

Wawancara Key Informan 11

Kode : N

Jabatan : Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami.	4	N/I/11/4
I	Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	16	N/I/11/6
I	Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami.	20	N/I/11/20
I	Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan	25	N/I/11/25
I	Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan	31	N/I/11/31
I	Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi.	34	N/I/11/34

I	• Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan.	38	N/I/11/38
I	• Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya.	41	N/I/11/41
I	• Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu.	46	N/I/11/46

Lampiran 11 TRANSKRIP WAWANCARA “N”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

N: Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami (**I Baris 4**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

N: Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 16**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

N: Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami (**I Baris 20**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

N: Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

N: Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

N: Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi (**I Baris 34**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

N: Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan (**I Baris 38**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

N: Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya (**I Baris 41**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

N: Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu (**I Baris 46**)

Wawancara Key Informan 12

Kode : T

Jabatan : Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami.	4	T/I/12/4
I	Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	16	T/I/12/16
I	Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami.	20	T/I/12/20
I	Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan	25	T/I/12/25
I	Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan	31	T/I/12/31
I	Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi.	34	T/I/12/34

I	• Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan.	38	T/I/12/38
I	• Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya.	41	T/I/12/41
I	• Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu.	46	T/I/12/46

Lampiran 12 TRANSKRIP WAWANCARA “T”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

T: Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kami pun akan takut. Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami (**I Baris 4**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

T: Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 16**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

T: Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami (**I Baris 20**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

T: Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

T: Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

T: Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi (**I Baris 34**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

T: Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan (**I Baris 38**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

T: Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya (**I Baris 41**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

T: Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu (**I Baris 46**)

Wawancara Key Informan 13

Kode : M

Jabatan : Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami.	4	M/I/13/4
I	Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	16	M/I/13/16
I	Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami.	20	M/I/13/20
I	Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan	25	M/I/13/25
I	Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan	31	M/I/13/31
I	Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi.	34	M/I/13/34

I	• Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan.	38	M/I/13/38
I	• Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya.	41	M/I/13/41
I	• Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu.	46	M/I/13/46

Lampiran 13 TRANSKRIP WAWANCARA “M”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana penerapan pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi bagaimana Penerapan Pemerintah terhadap wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

M: Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami (**I Baris 4**)

Peneliti: Apakah kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak?

M: Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak (**I Baris 16**)

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

M: Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami (**I Baris 20**)

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki plat nomor kendaraan ?

M: Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 25**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki plat nomor kendaraan ?

M: Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 31**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

M: Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi (**I Baris 34**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

M: Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan (**I Baris 38**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Takalar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

M: Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya (**I Baris 41**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

M: Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu (**I Baris 46**)

Lampiran 14 DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara bersama “I” Sebagai Kasi Pembayaran dan Penagihan)



(Dokumentasi di Pelayanan Kantor Samsat Takalar)



(Kantor Samsat Kabupaten Takalar)

Lampiran 15 PERSURATAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kakatua No. 27 Telp. (0411) 873018-875050 Fax. (0411) 870093 Makassar 90121
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Telp. (0411) 449775 – 453308 – 453818 Fax. (0411) 453308 Makassar 90231



Nomor : 01380/C.04/FEB-IUMI/V/2024
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Samsat Takalar
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Atas Rahmat Allah SWT., dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya memberikan ijin kepada mahasiswa kami dibawah ini :

N a m a : Nurhidayanti Amir
NIM : 02320200033
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Akan melakukan penelitian pada penyusunan skripsi dengan judul:
"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Takalar "

Waktu penelitian : 22 Mei 2024
Lokasi Penelitian : **Samsat Takalar**
Demikian surat permohonan penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih
Wallahu Waliyuf Taufiq Walhidayah

Makassar, 22 Mei 2024 M
12 Dzulkaidah 1445 H



Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni


Muhammad Syamsu Alam, SE., M.Si., Ak.CA, ACPA
NIDN: 00150567

Tembusan

1. Rektor UMI Makassar
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI
3. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 251 TLP/FAX (0418) 323784

Takalar, 15 Juli 2024

Kepada

Nomor : 973/211 /UPTP-TKLR/VII/2024
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas muslim indonesia
Di -
Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis No :
01380/C.04/FEB-I/UMI/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 Hal Rekomendasi ijin Penelitian,
untuk itu kami dari Kantor UPT Pendapatan/Samsat Wilayah Takalar Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya *menyetujui* untuk
melakukan Penelitian kepada Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurhidayanti Amir
Nim : 02320200033
Jurusan : Akuntansi
Waktu KKLP : 22 Mei 2024.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih..

a.n. KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

NURAENI, SH., M.Kn
Pangkat : Penata
NIP : 19820426 200901 2 002